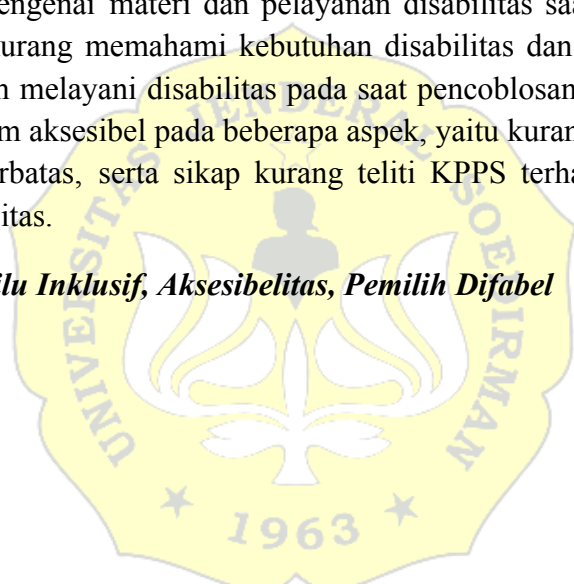


ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengetahuan dan sikap KPPS mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas di TPS 8 desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini penting dikarenakan minimnya pengetahuan KPPS terhadap kebutuhan penyandang disabilitas saat pemilu yang mengakibatkan tidak optimalnya sikap inklusif dan menyediakan kebutuhan penyandang disabilitas. Teori yang digunakan yaitu Teori Pemilu Inklusif dan Pemilu Aksesibilitas. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan sikap yang kurang inklusif terhadap hak disabilitas disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan PPS mengenai materi dan pelayanan disabilitas saat pemilu sehingga KPPS di TPS 8 kurang memahami kebutuhan disabilitas dan berimbas terhadap sikap KPPS dalam melayani disabilitas pada saat pencoblosan. Kedua, pemilu di TPS 8 masih belum aksesibel pada beberapa aspek, yaitu kurangnya pengetahuan, anggaran yang terbatas, serta sikap kurang teliti KPPS terhadap fasilitas yang dibutuhkan disabilitas.

Kata kunci: *Pemilu Inklusif, Aksesibilitas, Pemilih Difabel*



ABSTRACT

This article aims to examine the urgency of KPPS (Polling Station Working Committee) knowledge and attitudes regarding the political rights of persons with disabilities at TPS 8, Karangnangka Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency. This research is important due to the limited knowledge of KPPS about the needs of persons with disabilities during elections, which leads to a lack of inclusive attitudes and insufficient provision of necessary accommodations. The theories used in this study are the Theory of Inclusive Elections and Electoral Accessibility. The research method employed is qualitative with a case study approach. Data were obtained from both primary and secondary sources. The results show that the lack of knowledge and inclusive attitudes towards the rights of persons with disabilities is caused by several factors. First, there was no specific discussion held by the PPS (Village Election Committee) regarding materials and services for persons with disabilities during the election, resulting in a lack of understanding by KPPS at TPS 8 and consequently affecting their attitude in serving persons with disabilities during the voting process. Second, the election at TPS 8 was still inaccessible in several aspects, including lack of knowledge, limited budget, and KPPS's inattentiveness to the facilities needed by persons with disabilities.

Keywords: *Inclusive Elections, Accessibility, Voters with Disabilities*